

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KONDISI OBJEKTIF PENDIDIKAN DI INDONESIA	9
A. Pendahuluan	9
B. Dampak Krisis Multidimensi	11
C. Beberapa Permasalahan Pendidikan	14
D. Perlunya Reformasi Pendidikan	26
E. Kebijakan Pendidikan di Indonesia	29
BAB 3 KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN	37
A. Batasan Konsep Kebijakan	37
B. Perlunya Kebijakan Pendidikan	41
C. Stratifikasi Kebijakan Pendidikan	47
D. Jenis-jenis Kebijakan	52
E. Lingkungan Kebijakan	55
F. Makna Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan	58
G. Beberapa Istilah Penting	60

BAB 4 PROSES KEBIJAKAN PENDIDIKAN	63	BAB 7 MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA	153
A. Proses Pembuatan Kebijakan	63	A. Latar Belakang	153
B. Agenda Perumusan Kebijakan	68	B. Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun	154
C. Teori Perumusan Kebijakan dalam Pendidikan	71	C. Kebijakan Ujian Nasional	157
D. Aktor-aktor Perumus Kebijakan	73	D. Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan	158
E. Formulasi Kebijakan Pendidikan	80	E. Kebijakan Sertifikasi Guru	161
F. Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan	83	F. Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru	164
G. Beberapa Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan	86	G. Kebijakan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah	166
BAB 5 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	91	H. Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi	167
A. Sekitar Implementasi Kebijakan	91	I. Kebijakan Penerapan Kurikulum 2013	169
B. Beberapa Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan	96	BAB 8 KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN	171
C. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan	99	A. Masalah Desentralisasi Manajemen Kurikulum	173
D. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan	101	B. Masalah Desentralisasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	176
E. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Pendidikan	103	C. Masalah Desentralisasi Pembiayaan	178
F. Kendala dan Perspektif Keberhasilan Implementasi	106	D. Masalah Desentralisasi Manajemen Sarana dan Prasarana	181
G. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan	109	E. Masalah Desentralisasi Organisasi Kelembagaan	185
BAB 6 TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL	123	F. Persoalan Desentralisasi Bidang Perundang-undangan	189
A. Latar Belakang	123	G. Masalah Pembinaan dan Koordinasi	191
B. Kebijakan Pendidikan Sebelum Indonesia Merdeka	124	H. Beberapa Catatan dan Strategi Kebijakan	192
C. Kebijakan Pendidikan Masa Sebelum Orde Baru	128	BAB 9 KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM	197
D. Kebijakan Pendidikan Masa Orde Baru	134	A. Pendahuluan	197
E. Harapan Pendidikan Ke depan	138	B. Perspektif Historis	198
F. Pendidikan dalam Perspektif Pengembangan SDM	140	C. Permasalahan Pendidikan Islam	209
G. Arah Kebijakan Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	142	D. Pendidikan Islam sebagai Subsistem Pendidikan Nasional	213
H. Problema Kebijakan Pendidikan di Indonesia	146	E. Pendidikan Islam dalam UUSPN	215
		F. Reposisi Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah	219
		G. Peran Kementerian Agama	225

BAB 10 KEBIJAKAN OTONOMI TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI	227
A. Pendahuluan	227
B. Konsep Otonomi Perguruan Tinggi	229
C. Membangun Akuntabilitas Perguruan Tinggi	232
D. Undang-undang Perguruan Tinggi	234
E. Kompetensi Umum Lulusan Perguruan Tinggi	237
F. Kemampuan Membangun Networking	239
G. Perguruan Tinggi dan Pembangunan Kualitas SDM	240
BAB 11 KEBIJAKAN INOVASI PENDIDIKAN	245
A. Pengertian dan Hakikat Inovasi Pendidikan	246
B. Masalah yang Menuntut Inovasi	247
C. Tujuan Inovasi Pendidikan	248
D. Beberapa Contoh Kebijakan Inovasi Pendidikan	252
BAB 12 PENUTUP	275
DAFTAR PUSTAKA	277
DAFTAR LAMPIRAN	281
Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum	283
Lampiran IA Pedoman Pengembangan Muatan Lokal	297
Lampiran IB Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler	306
Lampiran IC Pedoman Umum Pembelajaran	314
Lampiran ID Pedoman Evaluasi Kurikulum	366
Lampiran II UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	374
Lampiran III UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	414
BIODATA PENULIS	441